

ANALISIS TENTANG DEKEMALISASI DI TURKI PASCA ATATURK

Nur Aliyah Zainal

Dosen Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar

E-mail: liaeman7876@gmail.com

Abstract

The failure of the coup attempt in Turkey this year showed the support for Kemalism proved with only a small group of military who do. Kemalism that carries nationalism, secularism and Westernism have lived for many years in Turkey. But into the early 2000s with the victory of the AK Party and the election of Erdogan's Islamist assessed in several key positions such as mayor and then Prime Minister and now President showed the phenomenon of decline in support for Kemalism and the Turkish people's desire to return to practice religion freely. Not only that, the constitutional changes also contribute to it.

Keywords: *AKP, Ataturk, Dekemalisation, Erdogan, Kemalism, Military*

Latar belakang

Bulan Juli 2016, dunia dikejutkan oleh usaha kudeta yang dilakukan sekelompok perwira di tubuh Angkatan Bersenjata Turki. Kejadiannya berlangsung ketika Presiden Recep Tayyip Erdogan sedang berada di luar negeri. Kelompok yang menamakan diri sebagai “Dewan Perdamaian” menyatakan mengambil alih kekuasaan, memberlakukan jam malam dan status darurat. Presiden Erdogan langsung merespon peristiwa ini dengan muncul melalui internet dan televisi nasional Turki dan menyerukan kepada masyarakat untuk turun melawan pemberontak, dan hasilnya 60 orang tewas dan lebih dari 700 orang Angkatan Bersenjata Turki ditahan.¹

Kudeta tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru terjadi. Sejak Mustafa Kemal Attaturk (selanjutnya disebut dengan Attaturk) meninggal pada tahun 1937, Turki telah mengalami beberapa kudeta militer. Sebut saja pada tahun

¹Upaya Kudeta Gagal, Presiden Erdogan Bersihkan Tubuh Militer, http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160715_live_turki_militer diakses pada 29 Agustus 2016

1960, 1971, 1980, dan 1997. Tentara-tentara Turki didominasi oleh kelompok nasionalis dan sekuler yang sangat loyal terhadap Attaturk sehingga ketika militer menganggap bahwa pemerintahan yang berlangsung tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Attaturk (Sekularisme) maka kudeta pun dilakukan. Penulis beranggapan bahwa hal ini biasa terjadi di negara-negara yang pernah mengalami kudeta di dalam negerinya tentunya dengan alasan-alasan yang berbeda. Pada prinsipnya ketika *corporate bussines*-nya militer “diganggu” maka mereka akan melakukan berbagai cara termasuk kudeta supaya kepentingannya aman.

Pemerintahan pasca Attaturk tidak lagi didominasi oleh kelompok-kelompok yang pro terhadap sekularisme. Justru kelompok-kelompok Islamis semakin mendesak pro Attaturk dan menginginkan syariat Islam yang telah diterapkan beratus-ratus tahun di tanah Turki diterapkan kembali. Gerakan-gerakan Islam di Turki seperti Gerakan An-Nur yang dipimpin oleh Syaikh Badiuz Zaman Said An-Nursi dan Partai Salamah menekan pemerintahan yang berlangsung untuk tidak berorientasi ke Barat. Gerakan An-Nur sendiri telah bekerja melawan pemerintah sejak Attaturk berlangsung sampai pasca kematiannya. Partai Salamah sendiri merupakan bentukan dari Necmettin Erbakan (Najamuddin Arbakan) yang dahulunya bernama Partai Nizham Nasional.² Dalam versi lainnya, Erbakan merupakan pendiri dari beberapa partai yaitu *National Order Party* (MNP), *National Salvation Party* (MSP), *Welfare Party* (RP), *Virtue Party* (FP), dan *Felicity Party* (SP).

Pasca Attaturk, pemerintahan yang berlangsung hampir sebagian besar merupakan lawan-lawan politik dari Attaturk sendiri, termasuk Erbakan yang menjadi perdana menteri pada tahun 1996 tetapi kemudian mundur pada tahun 1997 atas desakan militer. Erbakan berasal dari partai yang berideologikan Islam, Partai Kesejahteraan (*Welfare Party, WP*) dan menjadi perdana menteri pertama berhaluan Islam sejak 1923.³ Dapat dikatakan bahwa gerakan-gerakan anti

²Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit & Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2004) hal. 640

³Nina M. Armando (ed.), *Ensiklopedi Islam Jilid 8* (Jakarta:PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005) hal. 147

sekularisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam termasuk partai sudah memasuki ranah politik nasional Turki. Sejak Attaturk memerintah dengan sekularismenya, terdapat perlawanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam yang sangat menentang sekularisme.

Meskipun kelompok Islam tidak mampu untuk menentang prinsip sekularisasi yang berlaku secara langsung, tetapi mereka tetap menekankan fakta bahwa hubungan sosial dalam masyarakat Islam didasarkan pada norma agama. Inilah sebabnya mengapa ketegangan antara sekularisasi dan kesepakatan *back to Islam* menjadi masalah berkepanjangan.⁴ Dan saat ini perpolitikan nasional di Turki mulai dikuasai oleh sebuah partai yang berhasil memenangkan pemilu nasional beberapa tahun belakangan yaitu *Adalet ve Kalkynma Partisi* (AKP) atau *Justice and Development Party* namun partai ini resmi menyebut dirinya *AK Parti*. *Ak* dalam bahasa Turki berarti cahaya, murni, putih, bersih dan tidak terkontaminasi. *Ak Parti* berkonotasi partai cahaya dengan simbol partai sebuah bola lampu. AKP menolak klaim sebagai parpol yang menyimpan agenda politik Islamis. AKP mengklaim dirinya sebagai partai demokrat-konservatif yang menekankan nilai-nilai tradisional Turki yang religius.⁵

Kehadiran AKP sebagai partai pemenang pemilu yang dimulai tahun 2002, 2007 dan 2011 memunculkan wajah-wajah baru dalam pemerintahan Turki. Jika sebelumnya pernah didominasi oleh kaum militer maka kali ini berasal dari kaum sipil yang lebih religius Islam. Memang sudah sejak 1960an kelompok-kelompok Islamis mulai menguat dan masuk kedalam perpolitikan Turki dan menguasai pemerintahan. Meskipun demikian pengaruh militer dalam politik di Turki masih kuat, untuk itu pemerintahan Perdana Menteri Erdogan telah melakukan amandemen terhadap konstitusi Turki untuk menghilangkan masalah-masalah dalam demokrasi dan hubungan sipil-militer di negara tersebut.

Tujuan dari tulisan ini adalah menjelaskan pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk, menghubungkan militer dan sekularisme (Kemalisme), menganalisis

⁴Nina M. Armando (ed.), Ensiklopedi Islam Jilid 8 hal. 147

⁵M Alfian Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di Turki, Jurnal Politika Vol.10 No. 1 Tahun 2014, hal. 94

posisi militer pasca Attaturk dalam politik dihubungkan dengan percobaan kudeta terhadap Erdogan pada tahun ini.

Pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk

Abad pertengahan di Eropa sering disebut sebagai zaman kemunduran jika dibandingkan dengan zaman klasik (Yunani-Romawi). Sebaliknya, negara-negara Arab pada Abad Pertengahan mengalami kemajuan, namun akhirnya negeri-negeri ini sedikit demi sedikit mengalami kemerosotan dalam bidang kebudayaan dan kekuasaan. Di antara negara-negara Arab pada masa itu adalah Kerajaan Turki Utsmani yang merupakan kerajaan terbesar dan paling berkuasa selama enam abad lebih (1281-1924). Pada masa pemerintahan Turki Utsmani, para sultan bukan hanya merebut negeri-negeri Arab, tetapi juga seluruh wilayah Kaukasus dan Kota Wina, bahkan sampai Balkan. Kemudian tumbuhlah pusat-pusat Islam di Trace, Macedonia, Thessaly, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Albania dan sekitarnya.⁶

Kerajaan Turki Utsmani berdiri pada tahun 1281 di Asia Kecil. Pendirinya adalah Utsman bin Erthogril. Kata Utsmani diambil dari nama kakek yang pertama yaitu Utsman bin Ertoghil bin Sulaiman Syah dari suku Qayigh, salah satu keturunan Ogush Turki. Sulaiman Syah dengan 1000 pengikutnya mengembara ke Anatolia dan singgah ke Azerbaijan, namun dalam perjalanannya kemudian meninggal dunia. Kedudukannya digantikan oleh putranya Ertoghil untuk melanjutkan perjalanan sesuai tujuan semula. Sesampai di Anatolia, mereka diterima oleh penguasa Seljuk, Sultan Alaudin yang sedang berperang dengan kerajaan Bizantium (Khalifah Abbasiyah di Baghdad).⁷

Sepeninggal Erthogil, atas persetujuan Sultan Alaudin, kedudukan Ertoghil digantikan oleh putranya yang bernama Utsman yang memerintah Turki Utsmani antara tahun 1281-1324 M. Serangan Mongol terhadap Baghdad termasuk Seljuk yang terjadi pada 1300 M menyebabkan dinasti ini terpecah-pecah menjadi

⁶Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004) hal. 180-181

⁷Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam* hal. 181-182

sejumlah kerajaan kecil. Dalam kondisi kehancuran inilah Utsman mengklaim kemerdekaan secara penuh atas wilayah yang didudukinya, sekaligus memproklamasikan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Kekuatan militer Utsman menjadi benteng pertahanan sultan dinasti-dinasti kecil dari ancaman bahaya serangan Mongol. Dengan demikian, secara tidak langsung, mereka mengakui Utsman sebagai penguasa tertinggi dengan gelar “Padiansyah Ali Utsman”.⁸

Kondisi objektif yang dihadapi oleh Turki Utsmani membuat para pemimpin kerajaan membentuk negara yang didasarkan pada sistem dan prinsip kemiliteran. Pecahnya perang dengan Bizantium misalnya, mengilhami Khalifah Orkhan untuk mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan militer sehingga terbentuklah sebuah kesatuan militer yang disebut *Yaniseri* atau *Inkisariyah*.⁹ Kebijakan kemiliteran ini lebih dikembangkan oleh pengganti, yaitu Murad dengan membentuk sejumlah korps atau cabang-cabang *Yenisari*. Seluruh pasukan dididik dan dilatih dalam sarana militer dengan pembekalan semangat perjuangan Islam. Kekuatan *Yenisari* ini kemudian mengubah negara Turki Utsmani yang baru terbentuk menjadi mesin perang yang paling kuat, dan memberikan dorongan sangat besar bagi penaklukan negeri-negeri non muslim.¹⁰

Kerajaan Turki Utsmani kemudian mulai mengalami kemunduran pada saat Sultan Salim II (1566-1574) menduduki tahta pemerintahan. Para ahli sejarah menganggap hal ini merupakan titikawal keruntuhan Turki Utsmani dan berakhirnya zaman keemasannya. Ditandai dengan melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani yang menyebabkan sejumlah kekalahan dalam pertempuran menghadapi musuh-musuhnya. Pada tahun 1663, tentara Utsmani menderita kekalahan dalam penyerbuan ke Hongaria. Demikian juga pada tahun 1676 Turki Utsmani kalah dalam pertempuran di Mohakez, Hungaria dan dipaksa menandatangani perjanjian Karlowitz pada tahun 1699 yang berisi pernyataan

⁸Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam* hal. 182-83

⁹Yaniseri artinya organisasi militer baru, yakni jajaran elit militer Turki yang mayoritas anggotanya dari kelompok muda Sufi dan para pemuda Kristen yang telah memeluk agama Islam. Dalam Ajid Thohir hal. 183

¹⁰Ajid Thohir.....hal. 183-184

seluruh wilayah Hungaria, sebagian besar Slovenia dan Croasia kepada penguasa Venetia.¹¹

Dibawah ini beberapa faktor keruntuhan kerajaan Turki Utsmani yang dikategorikan dalam 2 hal, faktor internal dan eksternal.¹²

1. Faktor Internal

- a. Luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh penerusnya yang tidak memiliki kecakapan, hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi dan meningkatnya kriminalitas, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keruntuhan kerajaan Turki Utsmani.
- b. Heterogenitas penduduk dan agama. Philip K. Hitti dalam *Tarikh al-Daulah al-Islamiyah* menyatakan bahwa suatu negara yang landasan berdirinya untuk kepentingan militer, bukan untuk kemaslahatan bangsa, tidak akan mampu menyatukan keberagaman penduduk dan agama.
- c. Kehidupan bermegah-megahan (hedonisme). Para penguasa kerajaan Turki Utsmani mengubah pola hidup mereka yang cenderung mengikuti kehidupan Barat dan meninggalkan nilai-nilai Islam. Mereka menghambur-hamburkan kekayaan negara dengan berbagai macam kesenangan dan kemaksiatan.
- d. Merosotnya perekonomian negara akibat peperangan dimana sebagian besarnya mengalami kekalahan. Di satu sisi negara mengalami defisit, sementara di sisi lain uang negara dihambur-hamburkan untuk memuaskan kesenangan para penguasa yang tidak memedulikan kepentingan rakyat

2. Faktor Eksternal

- a. Timbulnya gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang berada dibawah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani mulai menyadari kelemahan dinasti yang sedang memerintah. Keterikatan mereka

¹¹Ajid Thohir.....hal. 190

¹²Ajid Thohir.....hal. 191-192

kepada kerajaan ini melalui proses penaklukan sehingga mereka mendapat kesempatan untuk bangkit dan melepaskan diri dari Turki Utsmani ketika mengalami kemerosotan pengaruh.

- b. Kemajuan teknologi di Barat, khususnya dalam bidang persenjataan. Sementara itu di Turki terjadi stagnasi ilmu pengetahuan, sehingga ketika terjadi kontak senjata antara kekuasaan Turki Utsmani dengan kekuatan dari Eropa, selalu mengalami kekalahan karena masih menggunakan persenjataan tradisional, sedangkan Eropa telah maju teknologi senjatanya.

Keruntuhan kerajaan Turki Utsmani kemudian melahirkan negara Republik Turki (Turki Modern) yang diproklamasikan oleh Mustafa Kemal Ataturk pada 29 Oktober 1923. Negara ini merupakan metamorfosis dari imperium Utsmaniyah yang berbeda sama sekali. Oleh Ataturk, Turki dibentuk menjadi sebuah negara yang sekuler modern, hal ini merupakan bentuk kekecewaannya yang amat dalam terhadap sistem kekhalifahan sebelumnya. Puncaknya ketika pada 3 Maret 1924, Ataturk membubarkan kekhalifahan tersebut yang telah ada sejak masa Sahabat Abu Bakar. Dalam pandangan Ataturk, kekhalifahan Utsmaniyah adalah struktur “gila” yang didasarkan atas sendi-sendi keagamaan yang rapuh. Menurutnya, sisa-sisa dinasti Utsman harus lenyap. Pengaturan dan pengadilan agama yang kuno harus segera digantikan dengan hukum perdata yang moder dan ilmiah. Oleh karena itu, sekolah-sekolah agama juga mutlak harus diserahkan kepada sekolah-sekolah pemerintah sekuler. Singkatnya menurut Ataturk, negara dan agama harus dipisahkan (sekularisme).¹³

Mustafa Kemal Ataturk lahir dengan nama Mustafa, karena panda di bidang matematika ia dijuluki “Kemal” yang artinya sempurna dan Ataturk berarti “bapak Turki” sebagai pendiri Turki modern. Lahir dari seorang ibu bernama Zubaedah, seorang wanita salehah dan Ayah yang bernama Ali Ridha seorang pegawai biasa pada salah satu kantor pemerintah di Istanbul. Ayahnya meninggal pada saat Ataturk masih kecil, sejak itu ibunya menjadi satu-satunya orang tua baginya. Oleh ibunya, pertama-tama dimasukkan ke Madrasah Fatima Mollah

¹³Ajid Thohir..... hal. 219-220

Kadin di kota kelahirannya. Sang ibu menginginkannya sebagai hafiz (penghafal Qur'an) dan *hoja* (guru/ustaz). Namun, Ataturk tidak puas dan memilih keluar kemudian masuk ke sekolah umum (Shemsi Effendi) di Salonika. Setelah menamatkan sekolah dasar dalam usia 12 tahun, kemudian masuk Sekolah Menengah Militer di Salonika. Kemudian melanjutkan pendidikan militernya pada Sekolah Latihan Militer di Montasir. Pada 1898 ia meneruskan studinya pada Sekolah Tinggi Militer di Istanbul hingga mendapat ijazah pada 1905 dengan pangkat kapten.¹⁴

Ataturk merupakan seorang yang cerdas sehingga digelar Kemal oleh gurunya semasa di sekolah menengah. Ilmu politik dipelajarinya secara otodidak dari temannya yang bernama Ali Fethi. Di samping itu ia juga mendalami bahasa Perancis yang dengan modal tersebut ia dapat membaca karya J.J. Rousseau, Voltaire, August Comte dan literatur berbahasa Perancis lain dalam ilmu sejarah dan sastra. Selama masa kuliah, Ataturk merupakan aktivis yang membentuk komite rahasia dan menerbitkan pamflet yang mendukung kritik terhadap pemerintahan Sultan yang menyebabkannya dipenjara beberapa bulan. Namun setelah tamat dari Sekolah Tinggi Militer dengan pangkat kapten tersebut kemudian dikirim dan ditugaskan di Damaskus dan di sana ia membentuk perkumpulan *Vatan we Hurriyet* (Tanah Air dan Kemerdekaan). Setelah pecahnya Perang Dunia I, segera ia dipanggil ke Istanbul dan dipromosikan sebagai Panglima Divisi I.¹⁵

Melihat banyaknya daerah yang jatuh ke tangan sekutu pada PD I dan apalagi Sultan Utsmani Turki telah berada di bawah pengaruhnya, Ataturk memandang perlu adanya pemerintahan tandingan di Anatolia. Kemudian pada tahun 1920 dibentuklah Majelis Nasional Agung dan dalam sidangnya di Ankara, Ataturk diangkat sebagai ketuanya. Melalui institusi ini, perjuangan politik Ataturk berjalan lebih sistematis. Setelah berjuang terus-menerus, akhirnya Sekutu secara *de facto* dan *de jure* mengakui kekuasaan majelis ini. Pada 23 Juli 1923 dunia internasional mengakui pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk.

¹⁴Nina M. Armando... (et.al.), Ensiklopedi Islam (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,2005) hal. 228

¹⁵ Nina M. Armando... (et.al.), Ensiklopedi Islam..... hal. 228-229

Kemudian pada 29 oktober 1923 Ataturk memproklamirkan Turki sebagai negara republik dan terpilih sebagai presiden pertama dan terus terpilih sampai wafat.¹⁶

Sebagai seorang presiden, dalam menjalankan pemerintahannya ia dinilai sebagai seorang diktator, partai yang boleh hidup di Turki saat itu adalah Partai Republik Rakyat (*Cumhuriyet Halk Partisi [CHP]*), dikenal keras dalam menjalankan gagasan **nasionalisme**, **sekularisme** dan **westernisme**.¹⁷ Sebagai seorang militer, ia memimpin bangsanya seperti layaknya memimpin pasukan, mengeluarkan berbagai perintah untuk menciptakan sebuah negara model Barat modern. Impiannya adalah Turki bisa menjelma sebagai negara kuat, modern dan dihormati. Menurutnya, satu-satunya jalan untuk mewujudkan ide ini adalah dengan jalan melakukan sekularisasi yang pada prakteknya adalah dengan melakukan **westernisasi** (pembaratan). Bagi Ataturk, kemajuan Turki hanya bisa diraih dengan penerimaan Barat secara total.¹⁸

Berkaitan dengan gagasan **nasionalisme**, Ataturk merancang bahwa Islam yang berlaku di Turki adalah Islam yang telah dipribumikan ke dalam budaya Turki. Sistem kekhalifahan dihapuskan demikian pula dengan hukum syariat tetapi kembali al-Qur'an dan al-Hadist serta menerjemahkan al-Qur'an dengan bahasa Turki. Menurutnya, Islam bisa diselaraskan dengan dunia modern. Turut campurnya Islam dalam segala sendi-sendi kehidupan membawa kemunduran pada bangsa dan agama. Dalam rangka merealisasikan gagasan **sekularismenya**, Ataturk menempuh beberapa cara, antara lain : (1) menghapuskan jabatan khalifah (1924), (2) memakai Undang-undang Sipil Swiss, (3) menghapuskan mahkamah syariah dan jabatan Syaikh al-Islam, (4) membatasi jumlah masjid, (5) menghapuskan kalimat yang menyatakan bahwa Islam merupakan agama negara, (6) memasukkan prinsip sekularismen dalam konstitusi Turki, (7) mengganti aksara Arab dengan huruf latin, (8) menghapuskan keberlakuan poligami, (9) membubarkan madrasah, *tekke* (gerakan tarekat), dan zawiat sufi, dan (10)

¹⁶ Nina M. Armando... (et.al.), Ensiklopedi Islam..... hal. 229

¹⁷ Nina M. Armando... (et.al.), Ensiklopedi Islam..... hal. 229

¹⁸ Ajid Thohir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2004) hal. 223

menggantikan *torbus* di kepala dengan topi ala Barat. Setelah melakukan serangkaian reformasi, Turki secara resmi menyatakan diri sebagai negara sekuler pada tahun 1937 yang kemudian dikenal dengan **Kemalisme**.¹⁹

Militer merupakan satu-satunya lembaga di Turki yang mampu bertahan selama 600 tahun baik dalam sejarah kekhalifahan (Ottoman) maupun masa kehidupan republik (Turki modern). Sejak pembentukannya, militer sangat terintegrasi dengan negara sehingga dalam sejarah kepemimpinan di Turki selalu diduduki oleh militer kecuali periode 1950-1960. Militer Turki tidak seperti di negara-negara lain seperti di Amerika Latin maupun negara tetangga (seperti Yunani, yang mewakili kelas masyarakat tertentu).²⁰ Tetapi militer Turki sangat terikat dengan negara sebagai pelaksana pemerintahan dan penjaga keberlangsungan sistem politik di dalamnya terutama sebagai *guardian of secularism*.

Beberapa pendapat seperti Hale yang menyatakan bahwa militer menarik diri dari politik praktis dan berada dibelakang layar politik. Sama dengan pendapat Huntington bahwa partai pemerintah (CHP/Partai Rakyat Republik) dibentuk/lahir dari “rahim” militer, politik jenderal menciptakan partai politik dan partai politik pula yang mengakhiri politik jenderal tersebut. Namun dalam pidatonya pada bulan Februari 1931 (*Konya Speech*), Atatürk menyatakan bahwa setiap langkah negara Turki harus senantiasa melihat ke militer karena militer adalah penjaga dari cita-cita bangsa. Lebih jauh lagi, dalam Pasal 34 Undang-undang *Army Internal Service* yang dibentuk pada tahun 1934 (*Law No. 2271*) menyatakan bahwa “tugas dari angkatan bersenjata adalah untuk melindungi dan mempertahankan Tanah Air dan Republik Turki sebagaimana yang ditetapkan oleh Konstitusi”. Disatu sisi, militer oleh *founding fathers* dibatasi pengaruhnya di dalam politik akan tetapi di sisi lain militer ditempatkan sebagai pemilik dan penjaga Republik.²¹ Dalam hal ini, pemahaman penulis bahwa meskipun militer

¹⁹ Nina M. Armando... (et.al.), Ensiklopedi Islam..... hal. 229-230

²⁰ Kemal H. Karpat, *Turkish Democracy at Impasse : Ideology, Party Politics and the Third Military Intervention* dalam Syafiq Mughni (ed.), *An Antology of Contemporary Middle Eastern History* (Quebec : Conundrum Press) hal. 8-9

²¹ Zeki Sarigil, *The Turkish Military : Principal or Agent?*, *Jurnal Armed Forces & Society*, 2012, sagepub.com/journalsPermissions.nav diakses pada 15 Agustus 2016

tunduk terhadap pemerintahan Ataturk akan tetapi posisinya dalam negara sangat kuat karena setiap tindakan atau keputusan negara harus mengacu kepada angkatan bersenjata. Dapat dipahami jika militer tunduk kepada Ataturk karena ia juga berasal dari militer sehingga lembaga ini tentunya mendukung setiap keputusannya.

Studi-studi militer dan politik menunjukkan bahwa ada 2 model hubungan sipil-militer yang berlangsung di suatu negara menurut Samuel Huntington, yaitu *Objective Civilian Control* (OCC) dan *Subjective Civilian Control* (SCC). OCC lebih memaksimalkan profesionalisme militer, lebih tepatnya adalah pembagian kekuasaan politik di antara militer dan kelompok-kelompok sipil untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi munculnya sikap dan perilaku profesional di antara para anggota militer (korps perwira). Metode ini yang paling memungkinkan menghasilkan hubungan sipil yang sehat. Orientasi militer cenderung kepada ancaman eksternal (dari negara lain atau pihak-pihak dari luar negara) daripada mencampuri urusan politik domestik.²² Sedangkan SCC adalah cara yang paling sederhana untuk meminimalkan kekuasaan militer dengan memaksimalkan kekuasaan sipil, namun cara ini menimbulkan hubungan sipil-militer yang kurang sehat karena merujuk pada upaya mengontrol militer dengan mempolitisasi mereka dan membuatnya lebih dekat kepada sipil.²³ Pemerintahan Ataturk menggiring militer untuk masuk kedalam urusan internal politik domestik sehingga tercipta kekuasaan yang cenderung diktator. Militer diposisikan sebagai “penjaga” keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara Turki.

Perlawanan-perlawanan terhadap pemerintah dapat diatasi oleh pengerahan militer, seperti dalam pemberontakan atau perlawanan yang dilakukan oleh Suku Kurdi di Anatolia Timur. Secara politik pula, pemerintahan Ataturk menutup jalan

²² Arief Yulianto, Hubungan Sipil-militer di Indonesia Pasca Orba di Tengah Pusaran Demokrasi (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,2002) hal. 87, dalam Nur Aliyah Zainal, Hubungan Sipil-Militer di Chile Pasca Augusto Pinochet, 1990-2006, Tesis, Jurusan Ilmu Politik Konsentrasi Hubungan Internasional Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2009

²³Samuel Huntington, Mereformasi Hubungan Sipil-Militer, dalam Larri Diamond dan Marc. F Plattner (ed.), Hubungan Sipil-Militer & Konsolidasi Demokrasi (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,2001) hal. 4, dalam Nur Aliyah Zainal, Hubungan Sipil-Militer di Chile Pasca Augusto Pinochet, 1990-2006, Tesis, Jurusan Ilmu Politik Konsentrasi Hubungan Internasional Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2009.

bagi terciptanya partai oposisi, yang boleh hidup di dalam negara waktu itu hanya Partai Rakyat Republik (CHP) sebagai partai tunggal. Setiap pemilihan umum, hanya dijadikan sebagai simbol dan seremonial biasa bukan bagian dari demokrasi.²⁴

Pemerintahan Pasca Ataturk (Kemalisme vs Islamisme)

Pemerintahan pasca Ataturk berada ditangan Ismet İnönü pada tahun 1938-1950, ia adalah seorang pensiunan jenderal. Sejak menjadi presiden menggantikan Ataturk, Ismet İnönü telah mendapat dukungan militer dan menyatakan bahwa partai-partai politik yang ada dilarang untuk mengganggu reformasi yang telah dilakukan oleh Ataturk (Kemalisme). Dalam pemerintahannya, partai politik diluar partai pemerintah (CHP) diperbolehkan untuk dibentuk dan masuk ke dalam majelis (legislatif), hal tersebut berlangsung sekitar tahun 1945. Ismet İnönü mengatakan kepada panglima angkatan bersenjata bahwa lembaga militer memiliki tugas untuk mempertahankan tatanan demokrasi. Dengan kata lain, militer, selain posisinya sebagai penjaga negara juga menjaga tatanan demokrasi yang baru saja hadir di Turki, meskipun militer masih dilarang untuk terlibat langsung ke dalam politik yang merupakan warisan Ataturk, meskipun demikian keberlangsungan demokrasi di Turki harus melalui persetujuan militer²⁵

Pasca pemerintahan Ataturk, militer memiliki peran dalam proses demokratisasi di Turki. Meskipun posisi militer tidak terlibat dalam politik domestik akan tetapi ketika demokrasi terganggu oleh pihak-pihak yang berkompetisi dalam memperebutkan kekuasaan yang dapat mengganggu tatanan negara maka militer akan melakukan intervensi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kali terjadi kudeta militer pasca Ataturk. Pada 27 Mey 1960 terjadi kudeta militer yang dilakukan oleh organisasi rahasia yang terdiri dari para

²⁴Solikhun, Negara Turki pada Masa Kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk (1925-1950), Jurnal Ilmiah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Studi Arab Universitas Indonesia, 2013, hal. 6

²⁵Kemal H. Karpat, Turkish Democracy at Impasse : Ideology, Party Politics and the Third Military Intervention dalam Syafiq Mughni (ed.), An Antology of Contemporary Middle Eastern History (Quebec : Conundrum Press) hal. 9-10

perwira angkatan bersenjata. Pemicunya adalah kebijakan *free enterprise system*²⁶ Presiden Celal Bayar dan Perdana Menteri Adnan Menderes dan kemudian memicu perpecahan di tubuh elit Turki. Kemudian Bayar dan Menderes diajukan ke pengadilan tetapi hanya Menderes yang berakhir di tiang gantungan. Jenderal Cemal Gamar kemudian mengambil alih posisi presiden dan perdana menteri dan mendominasi pemerintahan hingga tahun 1965 dan mengembalikan kepada rakyat untuk kembali memilih pemimpin negara.²⁷

Kudeta kembali lagi terjadi pada 12 Maret 1971, Militer kembali menggulingkan pemerintah menyusul kekerasan dan kekacauan yang terjadi selama beberapa bulan. Kerusuhan dan ketegangan politik itu dipicu resesi ekonomi dan perlawanan rakyat terkait menguatnya gerakan kelompok Islam di negeri itu. Kudeta kali ini disebut "kudeta memorandum" karena diwarnai ultimatum Jenderal Memduh Tagmac kepada PM Suleyman Demirel dan memaksanya untuk membubarkan pemerintahan.²⁸ Pada pertengahan 1960an aliran kiri berkembang di Turki, ketegangan politik yang terjadi di masa ini dipicu oleh ketakutan para elit nasionalis demokrat terhadap kelompok kiri pimpinan Jenderal Cemal Madanoglu (konon telah mendapat saran dari kaum intelektual radikal). Dalam hal ini, selain munculnya paham kiri (baik radikal maupun liberal) terlihat pula perpecahan di dalam tubuh militer.²⁹ Madanoglu misalnya membuka diri terhadap paham kiri selain pemahamannya tentang Kemalisme dimana militer sebagai penjaganya.

Masa-masa ini pula kemudian membangkitkan kembali semangat kelompok-kelompok Islam untuk muncul dipermukaan dan memperjuangkannya di dalam kebijakan. Bahkan pada tahun 1960 seorang Necmettin Erbakan

²⁶Sistem dimana barang, harga dan jasa ditentukan oleh pasar dan pemerintah tidak terlibat didalamnya atau bebas dari kontrol pemerintah (mungkin bisa disamakan dengan pasar bebas).

²⁷Sejak 1960, Militer kerap Melakukan kudeta <http://internasional.kompas.com/read/2016/07/16/09532431/sejak.1960.militer.turki.sudah.kerap.menggelar.kudeta> diakses pada 16 Juli 2016

²⁸Sejak 1960, Militer kerap Melakukan kudeta <http://internasional.kompas.com/read/2016/07/16/09532431/sejak.1960.militer.turki.sudah.kerap.menggelar.kudeta> diakses pada 16 Juli 2016

²⁹Kemal H. Karpat, *Turkish Democracy at Impasse : Ideology, Party Politics and the Third Military Intervention* dalam Syafiq Mughni (ed.), *An Antology of Contemporary Middle Eastern History* (Quebec : Conundrum Press) hal. 12

membentuk partai politik yang bernama *Mili Nizam Partisi* (Partai Nasional) meskipun kemudian dibubarkan oleh militer.

Era Pemerintahan Ismet Inano merupakan awal munculnya kembali kajian-kajian Islam di Turki. Setelah PD II usai, kegiatan keagamaan tampak di mana-mana, dan akhirnya menjadi pendapat umum masyarakat agar pelajaran agama kembali dimasukkan dalam kurikulum di sekolah. Pada era 1950an pula, upaya-upaya untuk merehabilitasi keadaan dilakukan seperti mengembalikan azan dengan memakai bahasa Arab, dan memperluas direktorat agama, dimana masa ini timbul subur kehidupan beragama di kalangan rakyat Turki.³⁰

Ide sekularisme sendiri menjadi polemik bagi mereka warga muslim Turki yang mengekang kebebasan untuk melaksanakan perintah agama. Mereka bingung dengan tipologi sekularisme Turki, dimana segala yang berbau agama akan dianggap melakukan penghinaan terhadap ideologi Kemalisme. Sekularisme juga direspon secara berbeda-beda oleh kelompok masyarakat di Turki. Bagi mereka sekularisme tidak mendatangkan kenyamanan tetapi justru menimbulkan kecurigaan dan kebencian satu sama lain. Elit Kemalis memiliki kebencian terhadap Islamis sehingga terjadi posisi biner dan kontraproduktif terhadap pembangunan nasional Turki yang ingin sejajar dengan negara-negara di Eropa. Oleh karena itu, kelompok Islamis membentuk lingkaran oposisi halus atas tindakan pemerintah melalui pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan seperti yang dilakukan oleh Fetullah Gulen (belakangan menjadi musuh pemerintahan Erdogan) atau kalangan pengusaha muslim kelas menengah Turki yang membentuk MUSIAD tetapi merespon sekularisme tidak melalui politik tetapi dengan isu-isu sosial sehingga dianggap tidak membahayakan bagi negara (sekularisme).³¹

Meskipun demikian ada pula kelompok yang secara terang-terangan mengambil posisi secara politis dan mensejajarkan diri dengan kelompok Kemalis

³⁰Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2004) hal. 227

³¹M. Sya'roni Rofii, *Partai AKP dan Ideologi Islam di Turki Modern (2001-2007)*, Skripsi, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah, Universitas Islan Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Hal. 49-50

dalam perebutan kekuasaan atau jabatan strategis baik di dalam eksekutif maupun legislatif. Mereka ini mendirikan partai-partai politik dengan berbagai ragam corak dan warna, baik ideologis maupun filosofis. Seperti Partai Refah yang juga didirikan oleh Erbakan yang berlandaskan ideologi Islam. Selain itu adapula partai yang memilih bersikap lunak terhadap pemerintahan Kemal dan menggunakan pendekatan yang lebih moderat dan akomodasionis dalam bingkai demokrasi dan konstitusi modern seperti Partai AKP.³²

Dekemalisasi, Partai AKP (*Adelet va Kalkynma Partisi*) dan Recep Tayyip Erdogan

Geliat untuk melepaskan diri dari sekularisme telah dilakukan kelompok-kelompok Islam baik melalui isu-isu sosial kemasyarakatan dan pendidikan maupun dengan membentuk partai politik dan menyejajarkan diri dengan partai lain yang telah ada terlebih dahulu. Partai yang berbasis Islam baik yang ideologis maupun filosofis seperti yang disebutkan sebelumnya mencoba untuk mengimbangi pendukung Kemalisme dalam politik pemerintahan. Munculnya kembali gerakan-gerakan mengembalikan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Turki bisa dianggap sebagai bentuk untuk mengurangi ataupun menghilangkan Kemalisasi yang telah hidup sejak tahun 1924.

Angin segar iklim demokrasi yang memberikan kesempatan kepada kelompok Islamis untuk masuk ke panggung politik Turki ketika kekuasaan dipegang oleh Presiden Turgut Ozal pada tahun 1983. Ozal³³ termasuk muslim yang moderat tetapi mengikuti iklim sekularisme, ia mempertanyakan kelayakan negara memiliki ideologi dan posisi militer yang mengontrol kebijakan negara termasuk terhadap Suku Kurdi seperti yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Selama pemerintahannya, ada beberapa momen-momen penting keberpihakan Ozal terhadap kalangan Islam seperti, didirikannya Partai

³²M. Sya'roni Rofii, Partai AKP dan Ideologi Islam di Turki Modern (2001-2007)..... Hal. 50

³³Ozal membangun jembatan baru antara negara, masyarakat dan agama. Bahkan ia memperkenalkan tradisi buka puasa selama bulan Ramadhan dalam lingkup administrasinya dan menjadi Perdana Menteri Turki pertama yang melaksanakan ibadah haji Mekkah (1988) dan memfilmkan kegiatan ibadahnya itu serta mempublikasikannya.

Kesejahteraan/Partai Refah (PK) yang berbasis Islam dimana mendapat perhatian dari masyarakat sehingga memperoleh sedikit keberhasilan dalam pemilu di masa Ozal. Ketika Ozal meninggal, justru partai ini memenangkan pemilihan walikota yang diselenggarakan pada bulan Maret 1994 dimana Erdogan terpilih sebagai walikota Istanbul.³⁴

Munculnya Partai AKP tidak lepas dari perbedaan di kalangan kelompok Islam yang membentuk partai politik. AKP merupakan bentukan Recep Tayyip Erdogan (selanjutnya disebut Erdogan) sebagai respon terhadap perpecahan di tubuh Partai Kebaikan (*Fazilet Partisi*, FP) pada tahun 2000. AKP menolak klaim yang menyatakan bahwa parpol ini menyimpan agenda politik Islamis. AKP mengklaim dirinya sebagai partai demokrat-konservatif (*Muhafazakarlar demokrat*) yang menekankan nilai-nilai tradisional Turki yang religius. Strategi ini didasari oleh kecenderungan masyarakat yang semakin konservatif, karena dominasi politik sayap kanan dalam waktu yang cukup lama terutama sejak era Ozal. AKP memperlunak identitas dan agenda Islam setelah berkuasa karena tekanan militer dan bitokrasi Kemalis. Partai ini harus mematuhi pedoman yang ketat rezim sekuler untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mempertahankan status hukumnya.³⁵

Perkembangan internasional juga turut menjelaskan mengapa AKP menolak dipersepsikan sebagai kekuatan Islamisme yang diidentikkan dengan terorismepasca peristiwa 9 september 2001. Kehadiran AKP sesungguhnya juga merupakan konsekuensi perjumpaan beberapa dekade antara Islam dan negara. Karenannya, ia bukan kekuatan yang a-historis, meskipun menegaskan dirinya demokrat-konservatif, justru kalangan Islamis dan sekuleris menuduhnya sebagai kamufase (*takiye*). Kalangan Islamis khawatir kalau AKP semata-mata agen politik Barat. Tetapi sebaliknya kalangan sekuler khawatir AKP menyimpan agenda hendak mendirikan negara Islam seperti Iran. Elit AKP selalu menolak

³⁴M. Sya'roni Rofii, Partai AKP dan Ideologi Islam di Turki Modern (2001-2007), Skripsi, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Hal. 55

³⁵ M Alfian Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di Turki, Jurnal Politika Vol.10 No. 1 Tahun 2014, hal. 94

pandangan demikian, dalam sebuah wawancara Abdullah Gul misalnya, menggambarkan keunikan Turki yang tidak saja jembatan antara Eropa, Asia, Timur Tengah dan Kaukasus, tetapi juga mayoritas muslimnya yang mengedepankan demokrasi, hak azasi manusia dan ekonomi pasar bebas³⁶

Selain pada strategi, daya tarik AKP terletak pada wajah-wajah baru yang moderat dan profesional. Selain Gul, yang paling menonjol adalah Erdogan yang memiliki latar belakang dan kiprah politik yang jelas. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Partai Refah (RP) Istanbul, sebelumnya pernah sebagai Ketua RP di Distrik Beyoglu sejak 1984. Pada tahun 1991 Erdogan terpilih sebagai anggota parlemen tetapi tidak dapat menempati kursinya. Namun, karir politiknya segera melejit setelah RP memenangkan pemilu lokal 27 Maret 1994 (25,19% suara). Kemenangan partai yang dipimpin oleh Necmettin Erbakan itu, mengantarkannya sebagai walikota Istanbul, kota paling besar dan bergengsi di Turki.³⁷

Erdogan memiliki kesempatan emas untuk membuktikan bahwa dirinya mampu memimpin Istanbul. Erdogan melakukan sejumlah terobosan yang penting dalam merespons kebutuhan perkotaan sehari-sehari seperti kelangkaan air, polusi, dan kemacetan. Permasalahan krisis air dipecahkan dengan menempatkan ribuan kilometer pipa baru. Masalah sampah dipecahkan dengan membangun fasilitas daur ulang. Polusi udara dikurangi dengan pemanfaatan gas alam sebagai sumber energi dan menggantikan bus publik yang ramah lingkungan. Kepadatan dan kemacetan Istanbul dipecahkan dengan membangun lima puluh jembatan, viaduk dan jalan raya. Erdogan melarang penjualan alkohol di fasilitas-fasilitas yang dimiliki kota, mencegah korupsi dengan menjamin dana kota digunakan dengan bijaksana dan membayar kembali sebagian besar dari 2 milyar US dollar utang Kota Istanbul dan mendatangkan investasi 4 milyar US dolar. Erdogan sempat ditangkap dan diadili karena terlibat dalam protes pembubaran RP. Ia divonis 10 bulan penjara atas tuduhan menjalankan aktivitas anti-sekuler.

³⁶ M Alfian Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di Turki..... hal. 94-95

³⁷ M Alfian Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di Turki.....hal. 95

Peristiwa ini tidak saja kehilangan jabatan walikota, tetapi harus mematuhi larangan berpolitik sampai 24 Juli 1999.³⁸

Dukungan pemilih AKP pada pemilu-pemilu Turki sejak 2002 menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, kendatipun gagal meraih suara di atas 50% dengan 34,28% suara pada pemilu 2002. Dengan angka tersebut AKP secara mengejutkan menang telak, bahkan angka dukungan ini melebihi RP pada pertengahan 1990-an. Ketika pemerintahannya dipandang sukses membenahi perekonomian dan menunjukkan kinerja yang progresif pro-Uni Eropa, AKP semakin naik daun dan dukungan suaranya meningkat secara signifikan menjadi 47% pada pemilu 2007. AKP semakin kokoh sebagai partai tunggal yang tidak harus membangun koalisi dalam pembentukan pemerintahan. Kesuksesannya terulang kembali pada pemilu 2011.³⁹

Mengemukanya karakter yang akomodatif terhadap demokrasi dan penonjolan identitas kanan tengah yang aspiratif terhadap kepentingan muslim, AKP tidak saja mampu mempertahankan basis dukungan pemilih konservatif, tetapi juga mendapatkan kepercayaan dari spektrum yang lebih luas. AKP dinilai sebagai partai yang mewarisi tradisi gerakan Islam (Islamisme) yang mengakar dan berjejaring luas. Para aktivis AKP terutama pemuda dan perempuannya aktif mendekati konstituen melalui tatap muka dan mengoptimalkan Pusat Komunikasi AK yang terdapat di markas pusat AKP maupun di provinsi, dimana semua warga diterima secara terbuka untuk mendiskusikan berbagai permasalahan, keluhan dan kebutuhan mereka dengan anggota partai.⁴⁰

Kehadiran AKP diperkaya oleh kuatnya tradisi Islamisme yang mengakar dan populer dalam isu anti-kemiskinan dan anti-pengangguran, sesuatu yang lazim diklaim oleh sebagai jargon sayap kiri. AKP juga dapat diterima oleh kalangan sekuler-demokrat karena isu-isu pro-demokrasi, mendukung modernitas dan pro-Uni Eropa. AKP juga diterima oleh borjuasi karena pro-pasar.

³⁸ M Alfian Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di Turki.....hal.95-96

³⁹ M Alfian Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di Turki.....hal. 96

⁴⁰ M Alfian Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di Turki.....hal. 96

Kerem Oktem mencatat bahwa AKP adalah fenomena perpaduan kesalehan Islam, demokrasi dan komitmen pasar bebas dengan label-label yang membentang dari Muslim-demokrat, moderat Islamis dan pasca-Islamis. Kemenangan AKP lebih terasa sebagai kekalahan pola pikir sekuler Kemalis.⁴¹ Kemenangan AKP dan naiknya pamor Erdogan yang dianggap mewakili “perasaan” kaum muslim di Turki turut memberi andil bagi menurunnya dukungan terhadap Kemalisme terutama sekularismenya. Karena pada dasarnya masyarakat tidak melulu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari karena akar religiusitas sudah mendarah-daging di dalam masyarakat Turki. Sekularisme yang dibangun oleh Atatürk lebih kepada aspek politik sehingga hal ini bisa berubah jika dilakukan perubahan-perubahan di dalam Konstitusi.

Militer sebagai penjaga Kemalisme, sejak tahun 2002 mulai mengalami perubahan. Amandemen konstitusi dan beberapa perubahan hukum lainnya telah menurunkan kadar keterlibatan militer Turki didalam politik domestik. Misalnya, memasukkan sejumlah sipil ke dalam MGK (*Milli Guvenlik Kurulu*) atau Lembaga Keamanan Nasional Turki (Amandemen konstitusi tahun 2001) dan beberapa amandemen lainnya yang menunjukkan usaha sipil untuk mendorong militer keluar dari politik praktis dan hanya mengurus urusan militer semata.⁴²

Pemilu tahun 2011, menempatkan AKP sebagai pemenang dalam perebutan kursi diparlemen sebesar 49,83% namun ini merupakan penurunan dari suara di pemilu sebelumnya. Kemenangan AKP ini seperti *de javu* mengulangi kemenangan-kemenangan sebelumnya. Sebagai partai yang dianggap bersih, AKP juga dipandang profesional dimana pemerintahannya banyak memberikan kemapanan dalam politik, keamanan dan ekonomi. Secara spesifik, kemengan AKP ini dikaitkan dengan tema besar AKP untuk menggulirkan konstitusi baru pasca pemilu 2007. AKP proaktif meyakinkan sekutu-sekutu Baratnya bahwa mereka perlu merombak konstitusi.⁴³ Keterlibatan militer di dalam politik

⁴¹M Alfian Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di Turki.....hal. 99

⁴²Lihat Zeki Sarigil, The Turkish Military : Principal or Agent?, Jurnal Armed Forces & Society, 2012, sagepub.com/journalsPermissions.nav diakses pada 15 Agustus 2016

⁴³M Alfian Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di Turki.....hal. 104

tentunya tidak sejalan dengan sistem yang berlangsung di Eropa. Keinginan Turki untuk menjadi bagian dari Uni Eropa harus diikuti oleh perubahan-perubahan khususnya secara politik terkait dengan peran militer di dalam negara. Maka kemudian wajar isu perubahan konstitusi menjadi agenda utama partai ini.

Popularitas Erdogan juga dikaitkan dengan kemenangan beberapa kali AKP dalam pemilu. Erdogan dinilai sebagai orang yang menawan secara postur tubuh dan mampu menampilkan kesan rendah hati dan melayani. Ia menjanjikan banyak hal mulai dari menulis ulang konstitusi sipil, mega proyek, kota-kota baru, kereta api supercepat yang merengkuh jarak sepanjang Mekah hingga Xian, jembatan suspensi, pembangunan lapangan-lapangan terbang, *tax holidays*, “proyek gila” kanal besar yang sejajar dengan jalur air Bosphorus, serta *ipad* untuk semua. Pasca kemenangannya, majalah *Time* mengidentifikasi Erdogan sebagai “seorang Islamis moderat dan tegas membela demokrasi sekuler”, serta “pemimpin dunia paling berpengaruh”.⁴⁴

Terkait dengan sekularisme, kemenangan AKP sebagai kekuatan politik pasca-Islamis di Turki membuka peluang untuk pemaknaan ulang sekularisme. Necmi Erdogan dan Fahriye Ustuner membuat peta pemikiran politik Turki dekade 1990-an yang ditandai dengan alternatif wacana neo-Kemalis yakni neo-liberal, pasca-liberal dan sipil Islam. Khusus sipil Islam menolak pandangan bahwa Islam itu anti-demokrasi dan mengkampanyekan perpektif Piagam Madinah. Mengemukanya alternatif atau tafsir lain terhadap Kemalisme, dapat dilihat sebagai tanda bahwa kemalisme telah menjadi ideologi paling formatif yang telah meninggalkan jejak-jejaknya, sehingga lebih tepat ditempatkan dalam konteks historis.⁴⁵ Hal ini menunjukkan deKemalisasi di Turki telah terjadi, tidak hanya dalam tubuh pemerintahan, konstitusi bahkan dalam tataran pemikiran pun sudah mulai ditinggalkan.

Meskipun sekularisme tidak meniadakan aktivitas keagamaan, bagi kalangan muslim saleh, ketatnya pembatasan simbolik keagamaan terutama dalam

⁴⁴M Alfian Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitan AKP di Turki.....hal. 105

⁴⁵M Alfian Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitan AKP di Turki.....hal. 107

soal pemakaian jilbab terutama di lembaga-lembaga pemerintahan dan universitas dipandang sebagai suatu ekspresi diskriminatif dan anti agama yang berlebihan. Kelompok sekuler dan militer konservatif reaktif terhadap isu pencabutan pelarangan jilbab dan mengaitkannya sebagai ancaman terhadap sekularisme. Setidaknya hingga kini militer merupakan gambaran institusi Kemalis yang masih utuh walaupun nampak tak berdaya dalam menghadapi pergeseran politik yang menempatkan simbol-simbol keagamaan hadir di istana.⁴⁶ Istri Erdogan mengenakan jilbab secara tertutup hal ini menunjukkan adanya perlawanan terhadap sekularisme yang melarang penggunaan simbol agama.

Kudeta yang coba dilakukan oleh sekelompok militer baru-baru ini (2016) namun kemudian gagal menunjukkan bahwa kekuatan militer yang pro Kemalisme sudah menurun. Militer tidak lagi bersatu untuk itu bahkan militer sudah mulai loyal kepada pemerintah terkait pada posisinya sebagai penjaga negara tidak lagi sebagai penjaga Kemalisme. Usaha kudeta tersebut juga menunjukkan bagaimana rakyat Turki sangat mendukung pemerintahan yang berlangsung dan turun ke jalan menghadapi para pelaku kudeta.

Penutup

Turki saat ini telah memasuki era baru, kelompok Islamis moderat yang menguasai jalannya pemerintahan menunjukkan kemajuan diberbagai bidang yang mendapat dukungan besar dari masyarakat. Perubahan konstitusi sedikit demi sedikit dilakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan peran militer yang besar di dalam politik. Dekemalisasi telah mulai terjadi tidak hanya dalam masyarakat sipil tetapi juga di dalam tubuh pemerintahan. Tentunya usaha tersebut mendapatkan reaksi dari pihak-pihak yang pro terhadap Kemalisme yang ditandai dengan beberapa kali terjadi kudeta pasca pemerintahan Ataturk.

Perkembangan Turki yang sangat pesat, apalagi negara ini sangat ingin tergabung dalam Uni Eropa sehingga hal-hal yang terkait dengan syarat menjadi anggota *union* tersebut harus dipenuhi termasuk peran minimalis militer di dalam

⁴⁶M Alfian Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di Turki.....hal. 108

politik. Meskipun demikian, Erdogan tidak pula meninggalkan negara-negara Arab termasuk terkait isu-isu Palestina-Israel dan *Arab Spring* yang sedang melanda beberapa negara di Arab.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Alfian M., Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di Turki, *Jurnal Politika* Vol.10 No. 1. 2014.
- Armando, M. Nina (ed.). *Ensiklopedi Islam Jilid 8*, Jakarta:PT. Ichtiar Baru van Hoeve,2005.
- Ash-Shalabi, Muhammad Ali. *Bangkit & Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2004.
- Huntington, Samuel. *Mereformasi Hubungan Sipil-Militer*, dalam Larry Diamond dan Marc. F Plattner (ed.), *Hubungan Sipil-Militer & Konsolidasi Demokrasi* (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,2001) dalam Nur Aliyah Zainal, *Hubungan Sipil-Militer di Chile Pasca Augusto Pinochet, 1990-2006*, *Tesis*, Jurusan Ilmu Politik Konsentrasi Hubungan Internasional Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Karpat, H. Kemal *Turkish Democracy at Impasse : Ideology, Party Politics and the Third Military Intervention* dalam Syafiq Mughni (ed.), *An Antology of Contemporary Middle Eastern History*, Quebec : Conundrum Press.
- Sarigil, Zeki. The Turkish Military : Principal or Agent?, *Jurnal Armed Forces & Society*, 2012, sagepub.com/journalsPermissions.nav diakses pada 15 Agustus 2016
- Solikhun, Negara Turki pada Masa Kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk (1925-1950), *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Studi Arab Universitas Indonesia, 2013.
- Thohir, Ajid. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2004.
- Yulianto, Arief. *Hubungan Sipil-militer di Indonesia Pasca Orba di Tengah Pusaran Demokrasi* (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,2002) dalam Nur Aliyah Zainal, *Hubungan Sipil-Militer di Chile Pasca Augusto Pinochet, 1990-2006*, *Tesis*, Jurusan Ilmu Politik Konsentrasi Hubungan Internasional Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2009.

Upaya Kudeta Gagal, Presiden Erdogan Bersihkan Tubuh Militer,
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160715_live_turki_militer
diakses pada 29 Agustus 2016

Sejak 1960, Militer kerap Melakukan kudeta
<http://internasional.kompas.com/read/2016/07/16/09532431/sejak.1960.militer.turki.sudah.kerap.menggelar.kudeta> diakses pada 16 Juli 2016